

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pada era globalisasi saat ini, nuklir merupakan energi yang dapat dimanfaatkan untuk sumber daya dan juga senjata militer seperti yang dimiliki oleh negara-negara maju. Negara-negara maju memiliki nuklir dengan tujuan agar negara dapat merasa aman dalam bidang keamanannya dan negara yang mendominasi dalam kepemilikan senjata nuklir salah satunya adalah Amerika Serikat. Di samping memberikan keamanan pada negara, kepemilikan nuklir oleh negara lainnya dapat memberikan rasa tidak aman bagi negara tersebut (Viney, 2015). Berkaitan dengan isu mengenai nuklir, salah satu agenda Amerika Serikat adalah menghentikan program proliferasi nuklir milik Iran.

Pada awalnya program nuklir oleh Iran ini dimulai pada masa kepemimpinan Shah Mohammad Reza Pahlevi dengan bantuan dari Amerika Serikat. Kemudian Iran juga menyetujui untuk mengikuti *Nuclear non-Proliferation Treaty* (NPT) pada tahun 1968 dan mulai diratifikasi pada tahun 1970, dimana NPT adalah perjanjian untuk menggunakan energi nuklir dengan tujuan yang damai dan tidak memproduksi senjata nuklir. Hal itu menunjukkan bahwa hubungan Iran dan Amerika Serikat dapat dikatakan stabil (Özdamar, 2009, hal. 121-124). Pada tahun 1979, kerja sama nuklir Amerika Serikat dan Iran berhenti sementara waktu sejak adanya revolusi Iran. Akan tetapi pada tahun 1980-an, Iran memulai kembali program nuklirnya dengan kerja sama dari Pakistan, Tiongkok dan Russia. Dengan adanya kerja sama itu, Iran

mengumumkan bahwa program nuklir tersebut bertujuan damai dan untuk kepentingan masyarakat. Tetapi pihak Amerika Serikat beranggapan bahwa program nuklir tersebut sebenarnya merupakan program pengembangan senjata nuklir (Sterio, 2016, hal. 70-71).

Hubungan Amerika Serikat dan Iran menjadi kurang harmonis pada saat kelompok oposisi Iran memberikan pernyataan bahwa Iran menyembunyikan program pengayaan uranium di Natanz yang didukung oleh bukti dari dokumentasi satelit. Dengan adanya pernyataan tersebut, pemerintah Iran kemudian memberikan tanggapan bahwa program nuklir ini memiliki tujuan yang damai dan mengizinkan pihak *International Atomic Energy Agency* (IAEA) untuk melakukan inspeksi. Meskipun begitu, Amerika Serikat tetap menduga bahwa program nuklir Iran digunakan untuk mengembangkan senjata nuklir dan hal itu juga menyebabkan munculnya rasa tidak aman pada Amerika Serikat terhadap Iran, karena menurut Amerika Serikat di sini terdapat 'usaha' Iran untuk mengembangkan senjata nuklir (Özdamar, 2009, hal. 121-124).

Pada tahun 2003 Iran sempat menghentikan pengayaan uraniumnya agar hubungannya dengan Amerika Serikat dapat membaik, akan tetapi usaha ini tidak ditanggapi dengan baik oleh Amerika Serikat. Hal itu dikarenakan Amerika Serikat beranggapan bahwa dalam dunia politik Iran sejak adanya peristiwa Revolusi Islam terdapat idealisme yang membentuk sentimen anti-western, dimana Amerika Serikat dan EU dianggap hanya ingin mendominasi Iran. Sehingga mereka beranggapan bahwa program nuklir tersebut berguna sebagai 'penghalang' dari neo-kolonialisme negara-negara barat. Oleh karena itu,

Amerika Serikat merasa ‘sulit’ untuk mengambil sikap yang kooperatif terkait isu program nuklir Iran ini (McGlinchey, 2012).

Dengan adanya isu mengenai program nuklir Iran tersebut, Amerika Serikat sebagai negara yang mendominasi nuklir merasa tidak aman karena Iran melakukan program proliferasi nuklir. Sehingga Presiden Bush berasumsi bahwa Iran mengembangkan nuklir sebagai senjata penghancur. Terkait dengan program nuklir Iran itu, Presiden George W. Bush cenderung menggunakan kebijakan yang agresif untuk menangani kasus ini. Kebijakan Presiden George W. Bush terhadap Iran salah satunya adalah meneruskan sanksi ekonomi dari Amerika Serikat untuk menekan Iran agar dapat menghentikan program nuklirnya (Wright, 2008).

Kebijakan George W. Bush yang cenderung agresif dan memberikan tekanan itu, berbeda dengan kebijakan Barack Obama yang cenderung mengajak kerja sama. Pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama, Amerika Serikat membuat kebijakan yaitu kebijakan *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)* dengan kerja sama antara Iran dan Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Perancis, Inggris juga Jerman. Kebijakan itu bertujuan untuk memastikan bahwa program nuklir Iran tetap berjalan aman dan sesuai dengan aturan (State, 2015). Di samping itu, Presiden Barack Obama juga membebaskan Iran dari sanksi ekonomi yang telah diberikan Amerika Serikat untuk menekan Iran. Dengan pembebasan sanksi ekonomi tersebut hubungan Amerika Serikat dan Iran mulai membaik (Morello, 2016).

Strategi yang digunakan pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama tersebut menarik untuk dilihat mulai pada perbedaan strategi George W. Bush yang cenderung agresif dan memberikan tekanan pada Iran, yang kemudian dapat

berubah menjadi kerja sama antara Amerika Serikat dan Iran dengan kebijakan-kebijakan luar negeri Presiden Barack Obama. Proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Presiden Barack Obama itulah yang menarik untuk dikaji.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana proses pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Barack Obama terkait program nuklir Iran?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor yang mendorong Amerika Serikat dalam kebijakannya terkait program nuklir Iran pada masa pemerintahan Barack Obama dengan menggunakan pendekatan model pengambilan kebijakan dari Graham T. Allison untuk suatu negara. Lalu, dampak apa saja yang berpengaruh terhadap hubungan Iran dan Amerika Serikat setelah kebijakan-kebijakan pada masa kepemimpinan Presiden Amerika Serikat tersebut diterapkan dan juga hal-hal atau pertimbangan apa saja yang melatar belakangi pengambilan kebijakan Amerika Serikat terkait program nuklir Iran tersebut.

1.4. SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah merupakan hal yang selalu menarik untuk dikaji, salah satunya yaitu kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait dengan adanya isu program nuklir Iran. Kebijakan Amerika Serikat mengenai program nuklir Iran yang menarik untuk dilihat salah satunya adalah perubahan dari masa pemerintahan Presiden George W. Bush ke

pemerintahan Presiden Barack Obama yang mana kebijakan Bush pada masa pemerintahannya fokus terhadap 4 hal yaitu, 1) Keamanan Israel dan negara-negara Teluk seperti Saudi Arabia, 2) Keamanan energi, 3) Mencegah adanya terorisme dan 4) Mencegah perluasan proliferasi nuklir hingga ke seluruh wilayah regional Timur Tengah (Simpson, 2016). Di samping itu, Amerika Serikat juga mendapatkan dukungan melalui *Security Council* pada *United Nations* (UN) dengan mengeluarkan resolusi 1696 pada tahun 2006 yang pada intinya agar Iran menghentikan pengayaan uraniumnya dan jika Iran tidak menghentikan pengayaan uraniumnya maka Iran akan menerima sanksi ekonomi ataupun sanksi diplomatik (Council, 2006). Fokus kebijakan Barack Obama juga masih sama seperti pada masa Bush yang dalam kasus ini adalah mencegah perluasan proliferasi nuklir dan sebagian kebijakan yang telah dilakukan pada masa Presiden George W. Bush tersebut juga masih diteruskan pada masa Pemerintahan Barack Obama, seperti pemberian sanksi ekonomi melalui UN pada tahun 2010 yaitu menggunakan resolusi UN 1929 (Thompson, 2011, pp. 7-8).

Hal yang menarik untuk dilihat dalam kasus ini adalah bagaimana Presiden Barack Obama mengambil kebijakan sehingga dapat mencapai tujuan Amerika Serikat agar dapat ‘mengontrol’ program nuklir Iran yang pada masa pemerintahan George W. Bush dapat dikatakan belum bisa dicapai. Pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama meskipun juga mengambil langkah yang tegas, kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Iran mengalami perubahan yaitu Amerika Serikat memulai kembali hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran. Dalam diplomasinya Presiden Barack Obama juga bekerja sama dengan negara-negara lain seperti Rusia, Tiongkok, Perancis, Inggris dan Jerman

agar Iran mengurangi pengayaan uraniumnya melalui kesepakatan JCPOA (Baidya, 2010, hal. 179-180).

Kebijakan Presiden Barack Obama tersebut tentu memiliki tantangan dan manfaat dalam setiap langkah kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, signifikansi dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pengambilan kebijakan luar negeri Presiden Barack Obama itu dalam mengatasi isu program proliferasi nuklir Iran dilihat dari konsekuensi dan manfaat dari kebijakan-kebijakan yang diambil sehingga dapat menghasilkan kesepakatan JCPOA dengan Iran. Selain itu, pada tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana dalam mencapai kesepakatan JCPOA terdapat proses *Rational Choice* sehingga Amerika Serikat memutuskan untuk mengambil langkah JCPOA tersebut dengan Iran dan negara-negara lain yang terkait.

1.5. CAKUPAN PENELITIAN

Skripsi ini fokus pada proses pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Barack Husein Obama terkait dengan program nuklir Iran. Hal yang mendasari penulis untuk mengambil analisis proses pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa Presiden Barack Obama karena kebijakan yang diambil Presiden tersebut dalam beberapa hal terlihat bertolak belakang dengan kepemimpinan yang sebelumnya. Akan tetapi, cara tersebut masih belum memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk membuat Iran ‘mengikuti’ kepentingan Amerika Serikat pada periode pertama pemerintahan Obama (Kryzanek, 2011).

Kemudian pada masa pemerintahan selanjutnya, Presiden Barack Obama memberikan beberapa perubahan pada arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat menjadi lebih diplomatis juga tegas melalui kebijakan yang memberikan hasil berupa kesepakatan *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) yang pada akhirnya disepakati oleh Iran sehingga Iran dapat ‘mengikuti’ kepentingan Amerika Serikat yang menginginkan agar Iran menurunkan presentase pengayaan uraniumnya (Entessar, 2018). Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa Presiden Barack Obama terhadap program nuklir Iran hingga menghasilkan kesepakatan JCPOA jika ditinjau dengan model *Action as Rational Choice* milik Allison.

1.6. TINJAUAN PUSTAKA

Terdapat beberapa literatur dan karya ilmiah yang juga membahas mengenai kebijakan Amerika Serikat pada masa Presiden Barack Obama terkait program nuklir Iran. Kemudian penulis akan mengambil beberapa literatur sebagai materi pendukung dan pembanding dalam penelitian ini.

1.6.1 Program Nuklir Iran

Iran melaksanakan program nuklirnya sejak pertengahan tahun 1960-an dengan bantuan dari Amerika Serikat. Selain itu, Iran juga menandatangani perjanjian *Non-Proliferation of Nuclear weapons* (NPT). Dengan perjanjian nuklir tersebut, Iran diperbolehkan untuk melakukan pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan yang damai dibawah pengawasan dari *International Atomic Energy*

Agency (IAEA). Hingga pada tahun 2003, Iran yang sebelumnya dikatakan mengembangkan senjata nuklir oleh pihak oposisinya mengatakan bahwa pengembangan nuklir tersebut hanya untuk tujuan damai. Meskipun begitu, pihak Amerika Serikat pada saat itu tidak percaya akan hal tersebut dan menginginkan adanya inspeksi lebih lanjut mengenai hal tersebut (Izadi, 2007, hal. 145). Dalam jurnalnya yang berjudul *A Discourse Analysis of Elite American Newspaper Editorials : The Case of Iran's Nuclear Program* milik Foad Izadi lebih menjelaskan bahwa media memiliki peran politik yang cukup penting dalam mempengaruhi pembuat kebijakan seperti contoh adanya gambaran dari para orientalis terhadap negara-negara muslim dan isu-isu politik mereka yaitu Islam adalah sumber ancaman. Hal itu berkaitan dengan isu program nuklir Iran yang lebih condong pada krisis kepercayaan Amerika Serikat terhadap Iran karena Amerika Serikat menganggap Iran adalah ancaman (Izadi, 2007, hal. 161-162). Media menjadi peran yang cukup penting seperti yang dikatakan oleh Izadi, dalam hal itu media dapat digunakan sebagai salah satu alat politik untuk menggiring opini publik agar publik setuju dengan kebijakan yang diambil oleh negara dan menciptakan citra suatu negara menjadi lebih baik atau bahkan lebih buruk.

Program nuklir Iran pada dasarnya merupakan suatu isu mengenai *power* Iran dengan pemerintahan di seluruh kawasan Timur Tengah, tanpa mengesampingkan masalah tentang aturan dari perjanjian NPT (*Non-Proliferation of Nuclear weapons*) yang diangkat oleh Amerika Serikat. Dalam hal itu, kepemilikan nuklir oleh Iran dapat menguntungkan bagi Iran agar Iran dapat menghalau pengaruh Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya di kawasan Timur Tengah. Ambisi Iran dalam program nuklirnya dan kronologi nuklir Iran

sejak tahun 2002 hingga 2006 tersebut dijelaskan oleh Shahram Chubin pada bukunya yaitu *Iran's Nuclear Ambitions* (Chubin, 2006). Salah satu ambisi Iran yang disebutkan diatas merupakan ambisi yang bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, oleh karena itu Amerika Serikat bertujuan untuk mengawasi program nuklir Iran agar program nuklir tersebut tetap 'aman' dan terkendali.

1.6.2 Kebijakan Amerika Serikat pada masa Pemerintahan Barack Obama

Isu mengenai program nuklir Iran yang masih belum tuntas pada masa pemerintahan Presiden George W. Bush memberikan tantangan bagi Presiden Obama yang menjabat selanjutnya. Terkait dengan isu tersebut, menurut buku *Containing Iran: Obama's Policy of "Tough Diplomacy"* yang ditulis oleh Sasan Fayazmanesh, Amerika Serikat dibawah kepemimpinan periode pertama Presiden Obama memberikan sanksi untuk lebih menekan Iran atau dalam buku ini disebut dengan istilah *Tough Diplomacy* yang salah satunya melalui *the Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act* (CISADA). Dalam buku ini juga dibahas mengenai berbagai sanksi yang telah memberatkan perekonomian Iran dengan tujuan agar perekonomian Iran runtuh sehingga Iran dapat mengikuti prosedur sesuai keinginan Amerika Serikat terkait program nuklirnya. Meskipun begitu, setelah periode pertama Presiden Obama berakhir, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa perekonomian Iran akan runtuh (Fayazmanesh, 2013).

Pada masa pemerintahan Obama periode kedua dengan kebijakan selanjutnya terhadap program nuklir Iran, Amerika Serikat berhasil membuat

suatu kesepakatan yaitu *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) dan dari literatur yang ditemukan terdapat beberapa penulis yang telah menulis mengenai kebijakan JCPOA tersebut, misalnya jurnal yang ditulis oleh Milena Sterio dalam *Case Western Reserve Journal of International Law* berjudul “*President Obama’s Legacy : The Iran Nuclear Agreement*” yang lebih fokus menjelaskan tentang kesepakatan JCPOA itu sendiri, dimulai dari pembebasan sanksi terhadap Iran, struktur kesepakatannya, dan juga keuntungan dan kerugian dari kesepakatan tersebut. Berdasarkan perjanjian JCPOA tersebut, Iran menyetujui untuk mengurangi produksi uraniumnya hingga 98% selama 15 tahun. Menurut Milena Sterio, perjanjian tersebut menguntungkan bagi Iran untuk memperbaiki ekonomi maupun citra dirinya di dunia internasional. Disisi lain, Amerika Serikat juga merasa diuntungkan karena tujuannya untuk mengurangi pengayaan uranium Iran dan adanya pengawasan yang lebih ketat dari IAEA terhadap Iran dapat terlaksana (Sterio, 2016, hal. 70-71).

Pada buku “*The Obama Administration’s Nuclear Weapon Strategy : The Promises of Prague*” yang ditulis oleh Aiden Warren menjelaskan tentang pemerintahan Obama dalam menanggulangi isu - isu terkait nuklir. Pada bagian program nuklir Iran, Aiden Warren hanya fokus pada tahun 2008 – 2012 saja. Pemerintahan Obama pada saat itu, menerapkan kebijakan *dual-track diplomacy* yang mana pada *track* pertama Presiden Obama menggunakan cara yang diplomatis antara Amerika Serikat, Iran dan negara-negara P5+1 agar dapat tercapai kesepakatan terkait program nuklir Iran. Tetapi di sisi lain pada *track* kedua, Presiden Obama memberikan tekanan pada Iran dengan berbagai sanksi ekonomi dan tekanan diplomasi, salah satunya yaitu melalui implementasi dari

Resolusi UN 1929 pada tanggal 9 Juni 2010. Meskipun begitu menurut Aiden Warren, program nuklir Iran tetap terus berlangsung walaupun perekonomian Iran terkena dampak yang besar akibat tekanan dari pihak Amerika Serikat dan negara-negara P5+1 (Warren, 2014).

Meskipun tulisan-tulisan diatas membahas mengenai isu program nuklir Iran pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama, fokus dalam penelitian ini akan melengkapi penelitian sebelumnya dengan melihat isu program nuklir Iran pada masa Presiden Barack Obama menggunakan landasan teori milik Graham T. Allison khususnya pada model *rational choice*. Fokus pada konsep *Rational Choice* tersebut yang akan membedakan penelitian ini dari penelitian lainnya, dimana konsep *Rational Choice* akan digunakan untuk menganalisis bagaimana proses pengambilan kebijakan Presiden Barack Obama selama dua periode pemerintahannya jika dilihat dari hal-hal yang melatarbelakangi kebijakan tersebut dan pertimbangan tantangan dan manfaat apa saja yang dihadapi pada saat pengambilan kebijakan.

1.7. LANDASAN KONSEPTUAL

Landasan teori atau konsep yang digunakan untuk skripsi ini adalah model pengambilan kebijakan yang dijabarkan oleh Graham T. Allison dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Dalam teori Allison dijelaskan 3 model pengambilan kebijakan, yaitu *Rational Choice*, *Bureaucratic Politics*, dan *Organizational Process*. Ketiga model pengambilan kebijakan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

1. *Bureaucratic Politics*

Model yang kedua adalah *Bureaucratic Politics*, pada model ini kebijakan luar negeri ditentukan dengan adanya proses interaksi dari berbagai aktor yang terlibat dalam suatu isu. Sehingga dalam proses pengambilan kebijakan ini akan ada proses tawar menawar kepentingan antara aktor-aktor yang terlibat dalam suatu isu (Allison, 1971, hal. 39-40).

2. *Organizational Process*

Model yang ketiga yaitu *Organizational Process*, pada model ini untuk menentukan kebijakan negara dilihat dari *Standard Operating Procedure* (SOP) yang sudah ada. Sehingga pengambilan kebijakan dilakukan dengan melihat dari apa yang berlaku sebelumnya atau dengan kata lain sesuai dengan aturan yang berlaku (Allison, 1971, hal. 78-79).

3. *Rational Choice*

Dalam model yang dijelaskan oleh Allison, *Action as Rational Choice* adalah model yang melihat perilaku aktor yang memiliki tujuan pada saat menanggapi suatu isu internasional dengan menggunakan alternatif kebijakan yang tersedia sehingga menghasilkan pilihan terbaik untuk memaksimalkan upaya dalam mencapai tujuannya. Pada model ini terdapat 4 tahap asumsi dasar menurut Allison, yaitu *Goals and Objectives*, *Alternatives*, *Consequences* dan *Choice*. (Allison, 1971, hal. 29).

a. *Goals and Objectives*

Dalam tahap *Goals and Objectives*, pembuat kebijakan mendeskripsikannya untuk mengukur skala dari setiap konsekuensi-konsekuensi dan kegunaan yang diambil dari setiap keputusan atau tujuan oleh seorang agen

atau pembuat kebijakan. Dapat dikatakan bahwa pembuat kebijakan dalam menentukan tujuannya mempertimbangkan beberapa hal, seperti segi keuntungan, kegunaan atau preferensi. Dari pilihan skala tujuannya tersebut maka pembuat kebijakan dapat memetakan apa saja kemungkinan yang akan terjadi jika mengambil tujuan itu (Allison, 1971, hal. 29).

b. Alternatives

Pada tahap yang kedua yaitu *Alternatives*, para pembuat kebijakan memilih diantara keseluruhan kebijakan alternatif yang ada pada suatu kondisi tertentu. Dalam model pengambilan kebijakan ini dari kebijakan alternatif-alternatif tersebut pembuat keputusan memilih alternatif yang memiliki spesifikasi tindakan yang cukup tepat untuk membedakannya dari alternatif yang lainnya sehingga lebih mendekati tujuannya. Kebijakan alternatif ini dalam *decision making* digambarkan melalui skema pohon keputusan/*decision tree* (Allison, 1971, hal. 29-30).

c. Consequences

Tahap yang ketiga adalah *Consequences*, dalam tahap ini kebijakan alternatif memiliki perkiraan hambatan dan manfaatnya masing-masing. Berbagai asumsi yang berbeda akan dihasilkan pada tahap ini tentang keakuratan pengetahuan pembuat kebijakan terkait konsekuensi dari pilihan kebijakan (Allison, 1971, hal. 30). Pembuat kebijakan menentukan konsekuensi yang relevan dari *benefits* dan *costs* sesuai dengan tujuannya dalam suatu kasus (Allison, 1971, hal. 33).

d. *Choice*

Tahap terakhir dari model *Rational Choice* ini adalah memilih salah satu dari pilihan kebijakan yang paling memungkinkan untuk mencapai tujuan negara terhadap suatu isu. Dalam hal ini pembuat kebijakan harus melakukan analisa terhadap konsekuensi ataupun hasil yang didukung dengan prediksi akurat sehingga kebijakan ini dapat menjadi kebijakan yang terbaik bagi negara tersebut (Allison, 1971, hal. 30).

Pada proses untuk menganalisis kebijakan Pemerintahan Barack Obama terkait program nuklir Iran ini model yang akan digunakan, yaitu *Rational Choice*. Model *Rational Choice* ini dipilih karena model pengambilan kebijakan ini dinilai sesuai untuk menjawab rumusan masalah pada skripsi ini dibandingkan dengan kedua model lainnya. Hal itu dikarenakan pada model *Bureaucratic Politics* cenderung melihat pengambilan kebijakan dengan adanya proses interaksi dan tawar-menawar kepentingan antar aktor. Model tersebut kurang sesuai karena skripsi ini lebih fokus pada proses pengambilan kebijakan Amerika Serikat saja.

Kemudian, model yang ketiga yaitu *Organizational Process* juga kurang sesuai untuk diterapkan pada skripsi ini karena model ini lebih melihat pengambilan kebijakan berdasarkan SOP. Sedangkan, dalam skripsi ini bukan melihat pengambilan kebijakan sesuai SOP, melainkan lebih fokus pada bagaimana Amerika Serikat pada masa Obama menentukan kebijakan dengan memilih kebijakan yang paling sesuai dengan kondisi Amerika Serikat dilihat dari manfaat dan tantangan dari kebijakan tersebut. Dengan pertimbangan tersebut maka dalam model pengambilan kebijakan *Rational Choice* merupakan model

yang paling tepat untuk melihat bagaimana kesepakatan JCPOA menjadi salah satu capaian pada masa kepemimpinan Presiden Barack Obama terbentuk.

1.8. METODE PENELITIAN

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana dalam mengumpulkan data-data yang terkait pada studi kasus dalam penelitian ini menggunakan studi literatur dan penjabarannya bersifat deskriptif (Sugiarto, 2015). Permasalahan pada penelitian ini akan digambarkan melalui pembagian subtopik agar dapat lebih jelas dalam menganalisis masalah. Kemudian analisa yang akan dilakukan menggunakan perbandingan data yang telah didapat dari data penelusuran pustaka yang akan membuat data menjadi lebih kredibel.

1.8.2 Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah Amerika Serikat yang mana penulis ingin melakukan analisa terhadap bagaimana proses pengambilan kebijakan-kebijakan luar negeri yang dibuat oleh Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama terkait program nuklir Iran jika dilihat dengan model pengambilan kebijakan *Rational Choice*.

1.8.3 Alat Pengumpul Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis akan mencari data melalui studi literatur dari berbagai sumber baik buku, google books, jurnal, maupun website-website resmi yang kredibel (Wibowo, 2011).

1.8.4 Proses Penelitian

Pada tahap analisis data ini akan dilakukan dengan cara kualitatif. Setelah melakukan pengumpulan data maka penulis akan memproses data-data tersebut menjadi beberapa subtopik. Permasalahan akan digambarkan melalui pembagian subtopik agar dalam menganalisis masalah dapat lebih jelas. Dalam subtopik tersebut akan dikembangkan lagi menjadi sebuah tulisan yang akan menjelaskan lebih detail mengenai subtopik tersebut. Lalu, dalam setiap tulisan pada subtopik tersebut akan dilakukan analisa melalui data-data yang telah ditemukan sehingga dapat memunculkan hasil dari analisa terkait kasus dalam penelitian ini.